

## **BAB II**

### **DINAMIKA POLITIK TURKI**

#### **A. Latar Belakang Politik Turki**

Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekular, dan bersatu. Sistem politiknya didirikan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, akibat Perang Dunia I. Sejak itu, Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri Persatuan Bangsa-bangsa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), OECD, dan OSCE, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949 dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia.<sup>9</sup>

#### **A.1. Geografi**

Republik Turki adalah sebuah negara dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200 km persegi) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan antara Timur dan Barat.

---

<sup>9</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Turki>

Turki adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara.

***Batas-batas Wilayah Turki adalah:***

1. Bagian Utara berbatasan dengan Laut Hitam
2. Bagian Barat Laut berbatasan dengan Bulgaria
3. Bagian Barat berbatasan dengan Yunani dan Laut Aegea
4. Bagian Timur Laut berbatasan dengan Georgia
5. Bagian Timur berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan, dan Iran
6. Bagian Tenggara berbatasan dengan Irak dan Suriah
7. Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Mediterania

Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental.

**A.2. Agama**

Sekitar 99% penduduk Turki adalah Muslim walaupun tidak pernah ada kajian mengenai ketepatan nisbah ini. Menurut tinjauan Eurobarometer, umat Islam terdiri dari 94% dari jumlah penduduk Turki. Dan menurut buku fakta *CIA World*, 99.8% dari penduduk Turki merupakan Muslim. Ada tiga minoriti masyarakat agama bukan-Islam yaitu , umat Kristian Ortodoks Greek, Kristian Orthodox Armenia, dan Yahudi dengan jumlah 0.2%. Kebanyakan umat Islam di Turki adalah Sunah

Waljamaah membentuk sekitar 85% dan kedua besar mazhab bukan-Islam adalah Alevi yang bukan Muslim Syiah, mereka membentuk sekitar 20%.

### A.3. Pembagian Wilayah

Provinsi-provinsi di Wilayah Turki yaitu:<sup>10</sup>

No.	Wilayah	No.	Wilayah
1	Adana	28	Malatya
2	Adıyaman	29	Manisa
3	Afyonkarahisar	30	Mardin
4	Ağrı	31	Mersin
5	Aksaray	32	Muğla
6	Amasya	33	Muş
7	Ankara	34	Nevşehir
8	Antalya	35	Niğde
9	Ardahan	36	Ordu
10	Artvin	37	Osmaniye
11	Aydın	38	Rize
12	Balıkesir	39	Sakarya
13	Bartın	40	Samsun
14	Batman	41	Şanlıurfa
15	Bayburt	42	Siirt
16	Bilecik	43	Sinop
17	Bingöl	44	Şırnak
18	Bitlis	45	Sivas
19	Bolu	46	Tekirdağ
20	Burdur	47	Tokat
21	Bursa	48	Trabzon
22	Canakkale	49	Tunceli
23	Cankırı	50	Uşak
24	Corum	51	Van
25	Denizli	52	Yalova
26	Diyarbakır	53	Yozgat
27	Düzce	54	Zonguldak

<sup>10</sup> <http://ms.wikipedia.org/wiki/1557>

## **B. Sistem Pemerintahan Turki**

### **1. Sejarah Perkembangan Sistem Pemerintahan Politik Luar Negeri Turki**

#### **a. Masa Kerajaan Kesultanan Usmani**

Di akhir abad ke – 18, wilayah dari Kerajaan Utsmani secara garis besar terdiri atas : Negara – negara Balkan (Yugoslavia, Albania, Yunani, Bulgaria dan sebagian Rumania), Anatolia (Turki di Zaman Modern) dan sebagian besar dunia Arab (Syria, Libanon, Yordania, Israel, Iraq, Kuwait, Mesir, Libya, Tunisia dan Aljazair) dengan jumlah penduduk kerajaan sekitar 25 juta.<sup>11</sup> Kesultanan Ustmani merupakan bentuk kekhalifan terakhir pada masa Islam yang berjaya pada abad ke – 15. Perhatian utama dari pemerintahan kesultanan ini adalah misi dakwah dengan memperkuat perdagangan dan militer serta melakukan perluasan wilayah.

Kerajaan Turki Ustmani yang terletak di wilayah Asiatik itu mayoritas penduduknya adalah muslim terutama warga Turki, Arab dan Kurdi. Sementara kelompok beragama kristen dan yahudi yang signifikan tersebar di wilayah Balkan (Yunani, Bulgaria, Serbia, Montenegro dan Vlah). Secara praktisnya bahwa dalam sistem pemerintahan pada masa ini dipimpin oleh Seorang Sultan<sup>12</sup>, dimana penguasa pertama yang juga dianggap sebagai pendiri dari kerajaan Turki Ustmani disebut Usman I.<sup>13</sup> Sebagai sebuah bentuk kekhalifan, Sultan memisahkan antara politik dan agama, dimana hukum Islam yang suci memiliki kekuasaan tertinggi namun tetap menjadi pemimpin sentral sebagai pimpinan bangsa sekaligus pemimpin Agama

---

<sup>11</sup>Zürcher Erik J. *Sejarah Modern Turki*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003. Hal. 3

<sup>12</sup> Inu Kencana Syafie dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, Rafika Aditama, Bandung, 2003. hal.77

<sup>13</sup>Jummi Nelli, *Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Turki Usmani;Hukum Islam*, Vol. VI no. 4. Desember 2006. Hal 433 - 434

Islam. Tetapi menjelang abad ke - 18 hukum itu terbatas pada masalah undang - undang keluarga dan kepemilikan khususnya undang - undang kriminal, dilandasi oleh keputusan - keputusan sekuler sultan yang disebut *Örfatau Kanun*.

Mayoritas Muslim yang merupakan penduduk pribumi kerajaan tersebut sama sekali bukan monolitik (penganut paham - paham mitos). Sedangkan orang - orang asing yang beragama kristen dan tinggal di kerajaan itu menikmati *Aman* (ampunan), bertindak dengan aman dibawah hukum Islam. Mereka diwakili oleh duta dan konsul masing - masing yang memiliki tingkat otonomi tertentu dalam mengurus kasus - kasus yang hanya menyangkut para anggota komunitas asing yang disebut kapitulasi tetapi selanjutnya mereka merasakan berada di bawah kapitulasi - kapitulasi kekuasaan itu dan dengan semakin berkembangnya kekuatan negara - negara Eropa.

Menurut ideologi Kerajaan Ustmani, masyarakat dalam kerajaan itu diorganisasikan seputar perbedaan antara elite penguasa yang tidak membayar pajak dan berhak membawa senjata dengan massa penduduk yang merupakan kebalikan dari elit penguasa. Elit penguasa yang disebut *askeri* (militer) atau *osmanli par excellences* terdiri dari semua pembantu sultan, kalangan militer, juru tulis, ulama dan ilmuwan religi. Menjelang tahun 1800 sistem pemerintahan Ustmani masih dapat disebut "patrimonial", yang merupakan sebuah konsep perluasan rumah tangga Sultan. Dimana pola pemerintahan rumah tangga yang dimaksud tidak hanya para anggota keluarga, tetapi juga para pelayan, budak dan klien adalah karakteristik kaum elit Ustmani di semua Tingkatan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Zürcher Erik J. *Sejarah Modern Turki*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003. Hal. 6

Kaum elit tersebut tidak hanya menjalankan kekuasaan, tetapi juga merupakan pemelihara peradaban klasik, peradaban besar yang berdasarkan pada sumber-sumber Islami yang tertulis dimana ulama adalah para penjaganya dan direproduksi melalui sistem kolese keagamaan yang disebut *Medrese*. Berdasarkan pada aturan perilaku dan cita rasa yang lebih sekuler yang disebut *adab* (karakteristik kaum elit birokrasi/militer dan diproduksi melalui pendidikan dan pelatihan formal). Secara ideologi resmi bahwa tugas utama penguasa dan para pembantunya adalah melindungi umat Islam dari dunia luar dan memelihara *adalet* (keadilan dalam pandangan masyarakat Ustmani dalam peran pemerintah di Masyarakat) di dalam masyarakat Islam.

Ideologi kerajaan Ustmani menekankan eksklusivitas hubungan antara penguasa beserta para pembantunya dan rakyat. Sultan yang mewakili kekuasaan kekuasaan Absolut dan banyak dari para pembantunya, walaupun juga berkuasa karena merupakan para delegasi otoritas saja, secara teknis merupakan para budaknya. Sistem pemerintahan Ustmani dan sistem kepemilikan tanah senantiasa diperkuat untuk menegah munculnya pusat – pusat kekuasaan yang menyaingi, misalnya aristokrasi.

Bila dibandingkan dengan pemerintahan negara – negara modern (tetapi bukan dengan negara – negara lain abad ke – 18) pemerintahan Kerajaan Ustmani memiliki Perbedaan dalam 3 hal :

*Pertama*, ia amat kecil. Pengertian secara absolut bahwa aparat pemerintahan terpusat di Istanbul yang mempekerjakan antara 1000 sampai 1500 *klerek*. Tetapi secara relative sebagian dari produk nasional yang sampai ke pemerintah pusat

dalam bentuk pajak selama periode ini tidaklah diketahui secara pasti. Namun sebenarnya bahwa penghasilan untuk negara tidak sampai ke kantor keuangan pusat, sebab penghasilan tersebut banyak diselewengkan oleh para perantara. Pada masa ini kerajaan tersebut memiliki struktur yang sangat terpusat dan sebagian besar penghasilan pajak dimanfaatkan oleh bendahara provinsi yang menurut standar modern, minim mengupayakan untuk mempertahankan kerajaan, hukum, ketertiban, mengawasi pasar – pasar, mengeluarkan mata uang, menyediakan makanan dan membangun serta memelihara beberapa pusat atau bidang pekerjaan umum yang besar untuk kawasan perkotaan khususnya Istanbul.

*Kedua*, skala kecil aparat pemerintah mengandung makna bahwa tidak seperti pemerintahan modern yang dalam banyak hal yang secara langsung mengurus warga negaranya, pemerintah Ustmani amat sering hanya mengurus para wakil rakyat. Alasan utama bagi hal ini, tentu saja adalah bahwa negara kekurangan sumber daya untuk mengurus setiap setiap individu. Seperti halnya dalam masyarakat pra modern, individu berada di bawah kelompok atau kelompok kelompok lain, di mana ia menjadi bagian dari mereka.

*Ketiga*, tidak ada konsep persamaan di muka hukum. Dalam artian bahwa penduduk di perkotaan diperlakukan dengan cara yang berbeda dari warga pedesaan, Umat kristen dan yahudi diperlakukan berbeda dengan Umat Muslim sedangkan Kaum Nomad diperlakukan berbeda dari warga yang menetap terlebih kaum wanita yang juga diperlakukan berbeda dengan kaum pria. Karena pemerintahan pusat yang tidak pernah menjalankan pengendalian yang memadai bahkan amat minim bila

dibandingkan dengan pengendalian yang dilaksanakan oleh negara – negara modern. Kerajaan Ustmani kehilangan sebagian besar kekuasaan yang pernah dimiliki.

Secara ekonomis, Kerajaan Ustmani adalah sebuah negara kapitalis. dimana kebijakan – kebijakan perekonomian negara bertujuan untuk memberikan nafkah hidup bagi penduduk dan menyediakan kebutuhan bagi pusat – pusat populasi yang besar dan menarik pajak dalam bentuk uang maupun barang. perekonomian Ustmani yang menganut sistem perekonomian agrikultural dengan ciri – ciri kepemilikan tanah di bagian – bagian kerajaan yang lebih subur adalah kepemilikan kecil – kecil. Secara nominal, bagian terbesar tanah pertanian dimiliki oleh negara, sedangkan sebagian lagi yang lebih kecil memiliki status legal sebagai tanah milik yayasan keagamaan dan dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan masjid, perpustakaan, rumah sakit dan sekolah

Sistem perekonomian agrikultural yang diterapkan Kerajaan Ustmani memiliki basis pendapatan pajak utama negara dari produksi pertanian. pengumpulan pajak – pajak ini kemudian dilakukan melalui satu sistem pajak – pertanian. Bagi pemerintah pusat kerajaan sistem ini memiliki banyak keuntungan, antara lain karena : pendapatannya terjamin dimana pendapatan tersebut tidak lagi bergantung pada hasil – hasil panen. tetapi kemudian bagi para petani, kerugian terbesarnya adalah bahwa petani-pemajak itu dan para kreditornya akan ingin mendapatkan modal yang artinya dapat menambah beban petani. Di tempat dimana aturan perpajakan diberlakukan, para petani dan pemajak menambah kesempatan untuk berspekulasi dengan harga komoditas utama.



Akhirnya era pemerintahan orde baru Kerajaan Ustmani mengalami krisis keuangan sekaligus periode krisis ekonomi pada abad ke – 18. Perlengkapan negara Ustmani tidak memperoleh keuntungan dari peningkatan dari sistem perekonomian ini. Lemahnya kontrol negara / kerajaan terhadap wilayah diseluruh provinsi dapat menyatakan bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk meningkatkan situasi fisik dengan menarik pajak dari penghasilan – penghasilan baru, sementara di saat yang sama ekspor bahan makanan membahayakan pemenuhan kebutuhan di seluruh wilayah bagian kerajaan.

Politik pemerintahan yang bergejolak di dalam kubu kerajaan, ikut mempengaruhi implementasi politik luar negeri kerajaan tersebut. Menjelang tahun 1800 posisi kerajaan dalam politik internasional melemah secara perlahan – lahan selama dua abad. Hal ini dibuktikan dengan banyak aliansi kekuatan – kekuatan yang baru bermunculan, khususnya bangsa yang baru muncul di Eropa Barat dalam sektor ekonomi, teknologi sampai militer.

Kenyataan tersebut dibuktikan dalam serangkaian pertempuran yang hampir semuanya berakhir dengan kekalahan kerajaan Ustmani dan hilangnya wilayah kekuasaan. Pada abad ke – 17 dan awal abad ke – 18, musuh utama Ustmani adalah hasburg Austria, tetapi paruh abad ke – 18, Rusia di bawah kekuasaan ratu Catherine tampil sebagai ancaman utama. Antara tahun 1787 – 92 Sultan kemudian memaklumkan Perang terhadap Rusia, tetapi keadaan ini kemudian berakhir dengan kemenangan gemilang bagi Rusia yang kekuasaannya terhadap pantai laut hitam sebelah utara menjadi semakin kuat dan bahkan meluas sampai ke Dniester di sebelah barat dan Georgia di sebelah timur.

Kesultanan Kerajaan Ustmani kemudian mulai mengalami kemunduran pasca Revolusi Perancis di abad ke – 19 dengan adanya pengaruh ide – ide nasionalis dan reformis yang dibawa oleh bangsa barat sehingga membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tubuh kerajaan. Pada masa itu pertumbuhan nasionalisme itu semakin menjalar hampir keseluruhan wilayah kerajaan, pertama di wilayah bagian Balkan kemudian berkembang di provinsi – provinsi bagian asia. Besarnya jumlah pemberontakan yang terjadi di wilayah kekuasaan Ustmani juga merupakan alasan terpenting penyebab kerajaan ini runtuh.

#### **b. Turki Masa Orde Baru (1789 - 1807)**

Penguasa pertama yang memprakarsai perubahan – perubahan ini adalah Sultan Salim III, yang menaiki Tahta pemerintahan pada tahun 1789. Dalam tiga tahun masa pemerintahannya, Salim diharuskan memusatkan perhatiannya pada perang melawan Rusia. Tetapi ditahun 1792, dibantu oleh kerajaan Inggris dan Rusia sebagai penengah dalam peperangan itu kemudian menghasilkan perjanjian perdamaian yang disebut Perjanjian *küçük kaynarca* dengan beberapa perolehan wilayah kekuasaan tambahan bagi Rusia di kawasan laut hitam sebagai syaratnya.

Hampir tepat setelah penandatanganan perjanjian perdamaian, sultan kemudian meluncurkan program Reformasi yang disebut *Nizam-I Cedid* (orde baru). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan organisasi pemerintahan pusat untuk menghadapi musuh – musuh dari luar terutama Rusia. Semua kelompok dan individu didesak lagi untuk berada dalam *hudud* (batasan – batasan individu atau kelompok manapun agar tidak melanggar hak – hak orang lain) mereka. Dekrit –

dekrit Sultan Salim yang mendorong pemanfaatan pakaian tradisional khususnya pengaturan bangunan dengan jelas menggambarkan sisi kebijakan dalam pemerintahannya.

Reformasi *Nizam-I Cedid* atau orde baru menggambarkan perubahan program kemiliteran yang diawali dengan korps yang telah ada. Program ini memberikan separasi antara batas – batas yang bersifat militer dari fungsi administratif korps perwira untuk mencoba menghilangkan kesempatan korupsi dan untuk mengurangi jajaran militer melalui penghapusan tentara (mayoritas terbesar). Tetapi tidak lama setelah penerapan kebijakan ini tampak bahwa ternyata dalam sistem ini membuat reorganisasi tipe ini nyaris secara total tidak efektif.

Sang Sultan beserta orang – orang dalam jajaran pemerintahannya kemudian memutuskan untuk mengambil solusi yang lebih radikal yaitu dengan membentuk satu angkatan bersenjata baru di luar struktur militer yang ada. Tetapi secara operasional pembentukan angkatan bersenjata baru Sultan tersebut memerlukan adanya sistem pelatihan dan pendidikan baru serta menghabiskan banyak biaya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan itu sultan berupaya memikat para perwira asing (kebanyakan dari Perancis) sebagai penasihat dan instruktur selain pemerintah juga menerapkan cara-cara tradisional untuk meningkatkan pendapatannya, seperti penyitaan dan penurunan uang logam, mengurangi pegawai di kantor – kantor. Sehingga kesimpulannya pegawai yang terlalu banyak, favoritisme dan korupsi terbukti tidak bisa dibasmi tanpa pembayaran gaji regular dan tanpa peraturan yang jelas untuk menentukan posisi dan tugas.

Selain oposisi internal, Sultan Salim dalam usahanya untuk menciptakan reformasi juga dihalangi oleh fakta bahwa pemerintahannya bersamaan dengan pergolakan internasional yang diakibatkan oleh Revolusi Perancis dan perang – perang Napoleon. Sebab landasan politik luar negeri Utsmani selama 2 abad adalah hubungan dekatnya dengan Perancis yang sebagaimana telah disebutkan bahwa Salim sudah lama menjalin hubungan dengan raja Perancis dan tetap berlanjut setelah Revolusi Perancis dan bahkan hingga eksekusi raja Louis XVI. Meskipun demikian bahwa komplikasi – komplikasi internasional dan berbagai dampak dari Revolusi Perancis mempengaruhi Kerajaan Utsmani, tetapi besarnya pengaruh ideologis dari revolusi itu terhadap masyarakat Utsmani tidaklah begitu jelas.

Pada abad ke – 19 pertumbuhan paham nasionalisme yang meluas dari wilayah Balkan hingga ke bagian Asia, memang telah terbukti sebagai faktor penting dalam runtuhnya pemerintahan Utsmani. Kebijakan – kebijakan Salim yang kemudian membuatnya banyak dimusuhi setelah menyingkirkan kekuatan militer yang ada untuk membentuk sebuah angkatan bersenjata baru dan mayoritas ulama dan kalangan elit muda yang tidak menyukai pengaruh Perancis dalam pemerintahan. Sementara di kalangan Rakyat Sultan Salim kehilangan pamor sebagai figure pemimpin yang dianggap telah gagal menerapkan sistem reformasi yang justru semakin menambah beban biaya dengan pembayaran pajak tertentu seperti tembakau dan kopi.

Diragukan bahwa Sultan Salim dengan pemahaman yang terbatas tentang model model kerajaan Eropa yang ingin ia tandangi tetapi tanpa dana yang memadai dan menghadapi kepentingan besar yang ingin diraih oleh institusi tradisional yang

kuat dapat melahirkan reformasi yang bersifat radikal. Bulan Mei 1807 cadangan kontingen Jannisari yang berasal dari kota Istanbul memberontak dan menuntut penghapusan korps *Nizam-I Cedid* serta para reformis penting pengikut Sultan dipecat. Sultan Salim kemudian akhirnya menyerah tanpa perlawanan dan pada hari yang sama dia dijatuhkan dari kekuasaan atas dasar fatwa yang dimaklumkan oleh pramuka agama tertinggi, *Seyhülislam* yang menyatakan bahwa reformasi – reformasinya tidak sesuai dengan hukum agama.

#### -Republik Awal Turki – Masa Mustafa Kemal

Kekhlifaaan Ustmani kemudian runtuh ketika masa kekuasaan Sultan Mahmet VI Vahdetin Vahdettin. Transisi dari pemerintahan Ustmani kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan yang berbentuk Republik Turki yang ditandai dengan perjanjian damai *Lausanne* yang dipoklamirkan oleh Mustafa Kemal pada 29 Oktober 1923 dan Ismet sebagai perdana menteri pertamanya. Di awal masa jabatannya Mustafa Kemal kiat mengkonsolidasikan posisi politik seperti perubahan undang – undang penghianatan tinggi<sup>15</sup>, penyelenggaraan pemilihan umum, pembubaran majelis serta pembentukan partai baru yakni partai republik.

Pada dasarnya negara Turki yang baru terbentuk sebagai negara republik masih belum memiliki arah politik yang lebih jelas. Sebab pasca dihapuskannya kesultanan Ustmani, Turki diperintah oleh Majelis Nasional yang memiliki wewenang untuk memilih presiden dan menteri secara langsung. Hubungan konstitusional antara majelis dan khalifah Abdul Majid Efendi juga semakin tidak jelas, sebab sebagaimana amandemen 1922 yang menetapkan khalifah sebagai kepala

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 214

negara dimana batas yurisdiksinya melampaui batas-batas negara Turki dan meliputi dunia Islam.

*Kemalisme* merupakan ideologi yang dicetuskan Mustafa Kemal, membawa pengaruh serta perubahan besar – besaran terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Turki. Prinsip – prinsip dasar sebagai program partai pemerintah 1931 antara lain :

- Republikanisme, otoritas pemerintah hanya mengatur dan melayani rakyat Turki (Bukan seluruh umat Islam) seperti pada masa Kesultanan Ustmani, sementara kekuasaan politik berada di tangan rakyat melalui perwakilan di parlemen.
- Nasionalisme, kepentingan nasional dan keamanan nasional Turki akan didahulukan dan sebuah identitas nasional Turki akan menggantikan sistem kekhalifaan yang lama
- Populisme, Perlakuan yang sama kepada rakyat Turki tanpa memandang latar belakang agama maupun etnis.
- Reformisme, semua perubahan yang dilakukan Attaturk adalah sah dan dilakukan semata – mata untuk kebaikan rakyat Turki.
- Statisme, pemerintah nasional memegang peran utama dan secara langsung terkait kegiatan ekonomi, termasuk mengadakan semua investasi skala besar seperti bendungan, jalan raya, kereta api dan listrik.
- Sekularisme, Tidak ada status khalifah di Turki dan tidak ada lagi hubungan antara agama dan negara, sementara hukum – hukum Islam (Syariah) diganti dengan hukum baru sebagaimana dipakai oleh banyak negara Eropa lainnya.

Selain itu, tiga bidang utama yang mengalami reformasi besar dalam kekuasaan Mustafa Kemal yaitu Pendidikan, sosial budaya dan pemerintahan. Dalam bidang pendidikan dianggap sebagai media utama dalam proses doktrinasi paham sekuler dengan pemberlakuan Undang Undang penyatuan Pendidikan Maret 1924 dan disaat yang sama madrasah atau sekolah – sekolah agama dihapuskan lalu digantikan dengan sekolah – sekolah untuk imam dan Khatib.<sup>16</sup>

Bidang sosial budaya kemasyarakatan perubahan mendasar dilakukan pada simbol – simbol religius. Kebijakan yang diterapkan seperti melarang penggunaan cadar, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur resmi menggantikan hari Jum'at. Kemudian memberlakukan sistem kalender barat dan yang paling utama adalah pemberlakuan aksara alphabet latin sejak tahun 1928, mengganti bahasa negara menjadi bahasa Turki serta memindahkan ibu kota Turki dari Istanbul ke Ankara.

Perubahan pada sistem pemerintahan menggambarkan adanya penghapusan kesultanan dan kekhilifan setelah proklamasi republik dan pemberlakuan konstitusi sejak 1923. Selain itu kebijakan terhadap penghapusan ketentuan terhadap kenyataan bahwa Islam sebagai agama resmi negara Turki. Perubahan ini juga berpengaruh pada lembaga – lembaga yang masih pemerintahan yang masih menggunakan sistem hukum Islam.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hal 242.

### c. Sistem Pemerintahan Politik Luar Negeri di Era Presiden Abdullah Gul

Pada masa awal pemerintahan Turki, arah fokus dari politik luar negeri adalah bagaimana untuk membangun kepercayaan dan simpati dari negara lain, yang didasarkan untuk mendapat dukungan sekaligus pengakuan setelah deklarasi kemerdekaan Turki. Sementara dalam membangun hubungan politik dengan aliansi negara lain Republik Turki masih berkiblat untuk prioritas pada wilayah Barat khususnya Eropa dan Amerika Serikat. Sehingga tidak kurang dari 40 tahun keberadaan negara Turki bergelut pada upaya untuk membangun hubungan kerjasama integrasi bersama Uni Eropa terkait kejelasan status keanggotaan Turki di Uni Eropa.

Faktanya bahwa dewasa ini arah kebijakan Polugri Turki di era Pemerintahan Abdullah Gul terkesan semakin mengesampingkan hubungan kerjasamanya terhadap Uni Eropa. Banyak fakta yang kemudian mempertegas bagaimana keadaan yang merenggang antara Turki dan Uni Eropa saat ini. Kenyataannya Turki yang tidak lagi berorientasi penuh pada status keanggotaan di Uni Eropa.

Perubahan arah kebijakan luar negeri Turki yang membawa pengaruh hubungan terhadap Uni Eropa diterapkan setelah berkuasanya partai AKP yang dikenal sebagai partai berbasis Islam tahun 2001. Politik luar negeri Turki saat ini terlihat lebih mengutamakan untuk memperluas hubungan kerjasama ke seluruh bagian dunia dari pada harus terfokus pada aliansi Uni Eropa. Meskipun pernyataan ini tidak mengasumsikan bahwa Turki sepenuhnya meninggalkan Uni Eropa tetapi tetap menjadi salah satu kebijakan konstruktif pemerintah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmed Davotoglu, "Turkish Foreign Policy and The EU in 2010," *Turkish Policy Quarterly*, Volume 8 Number 3. hal. 12.



Sebagaimana kemudian arah hubungan yang dilakukan pemerintah Turki untuk menjalin interaksi kerjasama Internasional baik yang bersifat regional maupun bilateral termasuk hubungan dengan Indonesia, memiliki tujuan sebagai berikut<sup>18</sup> :

1. Keutuhan keamanan. Keamanan bukanlah *zero sum game* dimana keselamatan negara A bisa tercapai dengan mengorbankan kesejahteraan negara B.
2. Dialog. Semua masalah yang terkait dengan interaksi Turki dalam dunia internasional harus dapat diselesaikan melalui proses diplomasi dan interaksi politik.
3. Saling ketergantungan ekonomi. Turki akan memperkuat sektor ekonominya sehingga akan tercipta saling ketergantungan dengan negara-negara yang menjadi mitranya. Hal ini sangat penting untuk mencapai dan menjamin perdamaian yang berkelanjutan.
4. Harmoni budaya dan saling menghormati

Transisi yang memperlihatkan arah kebijakan politik luar negeri Turki pada masa pemerintahan Abdullah Gul menggambarkan situasi yang jauh berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Fokus dari polugri saat ini lebih banyak melakukan aktifitas di berbagai wilayah dibandingkan sebelumnya yang cenderung terkonsentrasi ke barat (Uni Eropa). Arah kebijakan polugri yang bersifat multi arah dan multi dimensi digunakan untuk memperluas jangkauan politik negara ini. Sehingga kebijakan multi arah dan dimensi yang dijalankan pemerintah Abdullah Gul

---

<sup>18</sup>*Ibid.* Hal. 13

dewasa ini merupakan bentuk implementasi kepentingan nasional yang tidak hanya terpusat pada satu region atau negara saja.

### 1. Eksekutif

Di dalam sistem pemerintahan Turki, lembaga eksekutif dipegang Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah ketua menteri atau seseorang yang mengepalai sebuah kabinet dalam sebuah negara dengan sistem parlementer. Biasanya dijabat oleh seorang politikus, walau kadang di beberapa negara seperti Thailand saat ini, dijabat oleh militer. Dalam banyak sistem perdana menteri berhak memilih dan memberhentikan anggota kabinetnya, dan memberikan alokasi jabatan tersebut ke orang yang dipilihnya, baik itu karena kesamaan partai maupun fraksi politik.<sup>19</sup>

Sementara itu jabatan Presiden lebih bersifat seremonial belaka. Tapi dalam kondisi politik yang berkembang sekarang, ia amat menentukan. Presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata yang bisa mengangkat dan memberhentikan pimpinan militer. Selain itu presiden memiliki kekuasaan untuk memveto legislatif dan memilih pejabat. Presiden juga bisa memveto pengangkatan jabatan birokratis, termasuk para hakim. Kemudian dia memiliki hak veto atas rancangan undang-undang dan Presiden berfungsi juga sebagai pengendali pemerintahan.

Jabatan selaku presiden di Turki tidak mempunyai signifikasi yang jelas jika dibanding dengan jabatan sebagai perdana menteri. Namun, selaku Presiden Turki, ia mempunyai peranan yang besar di dalam menentukan pelaksanaan dasar di

---

<sup>19</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Perdana\\_menteri](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdana_menteri)

negara tersebut. Walaupun sebagian besar kekuasaan politik masih berpusat pada perdana menteri.

## 2. Legislatif/Parlemen

Badan Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, Dewan Agung kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem Presiden, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.<sup>20</sup>

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau

---

<sup>20</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_parlementer](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer)

parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasnya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem.

Majelis Agung Nasional Turki (parlemen) adalah sebuah lembaga legislative yang didirikan di Ankara pada tanggal 23 April 1920..Majelis Agung Nasional Turki merupakan parlemen satu kamar (monokameral). Tugas parlemen Turki adalah menyusun undang-undang, dan jika dilakukan perubahan atas undang-undang maka harus mendapat persetujuan Presiden, bukan Perdana Menteri. 550 anggota parlemen dipilih setiap 5 tahun sekali. Legislatif (Parlemen) memilih presiden untuk satu masa jabatan tujuh tahun.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> [http://www.dpd.go.id/news\\_content.php?page=jurnal%20Siaran%20Pers&id\\_berita=490](http://www.dpd.go.id/news_content.php?page=jurnal%20Siaran%20Pers&id_berita=490)

### 3. Yudikatif

Di Turki badan kekuasaan yudikatif atau badan peradilan dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah hukum tertinggi untuk peninjauan konstitusi. Mahkamah ini "memeriksa konstitusionalitas, dalam pengertian bentuk dan substansinya, dari semua hukum, dekrit yang memiliki kekuatan hukum, dan Aturan-aturan Prosedur dari Dewan Nasional Agung Turki" (Pasal 148 dari Konstitusi Turki). Apabila perlu, badan ini juga berfungsi sebagai Mahkamah Agung untuk mendengarkan kasus apapun yang diangkat mengenai Presiden Republik, anggota-anggota Dewan Menteri, ataupun presiden dan anggota-anggota Pengadilan Tinggi.<sup>22</sup>

#### Komposisi Anggota Mahkamah Konstitusi

Asal Lembaga	Biasa	Pengganti
Pengadilan Banding Tinggi	2	2
Dewan Negara	2	1
Pengadilan Banding Tinggi Militer	1	-
Pengadilan Administratif Tinggi Militer	1	-
Pengadilan Audit	1	-
Dewan Pendidikan Tinggi	1	-
Pejabat dan pengacara administratif senior	3	1
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>4</b>

<sup>22</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/mahkamah\\_konstitusi\\_Turki](http://id.wikipedia.org/wiki/mahkamah_konstitusi_Turki)

### C. Partai-partai Politik Turki

Sejak tahun 1925, pemerintah Turki merupakan sebuah rezim satu partai yang otoriter, dan sebuah kediktatoran dibawah Mustafa Kemal Pasha. Partai Rakyat Republik( PRR) adalah partai politik pertama yang dibentuk Mustafa Kemal yang telah membangun monopoli kekuasaan, untuk menjalankan roda Pemerintahan dan pada kongres partai di tahun 1931 politik Turki secara resmi dinyatakan bersistem satu partai. Sejarah Turki menunjukkan pemerintahan Kemal dengan sistem pemerintahan satu partai tidak memberi ruang bagi kemunculan partai oposisi. Iklim Demokrasi muncul kemudian sejak Turki menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan terus berkembang menunjukkan kemajuan yang pesat. Pada tahun 1946 Turki memberlakukan politik demokrasi multi partai. Suara terbagi diantara blok kanan-tengah ( Partai Demokrat dan penggantinya, Partai Keadilan, Partai Tanah Air, Partai Jalan Lurus, berikut dengan cabang-cabangnya) yang menguasai antara 45 sampai 60 persen suara. Dan blok yang dapat diistilahkan dengan kiri-tengah Partai Rakyat Republik, Partai Populis Demokrat Sosial dan Partai Kiri Demokrat) yang menguasai antara 25 sampai 40 persen suara.<sup>23</sup>

Politik Radikal, baik berdasarkan Marxisme, fundamentalisme maupun fasisme versi Turki masih tetap merupakan fenomena marginal, namun sejak tahun 1994, kekuatan penting ketiga telah muncul ke permukaan dalam bentuk Partai Kesejahteraan, Partai berbasis Islam( namun bukan fundamentalis) yang menguasai sekitar lebih dari 30 persen suara. Blok kanan-tengah dan kiri-tengah

---

<sup>23</sup> Erik J Zurcher, *Sejarah Modern Turki*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 43

suara secara berurutan.

Turki kembali ke dalam demokrasi multi partai. Model multi partai ini berharga mahal bagi Inonu yang kehilangan kursi kepresidenannya pada tahun 1950, setelah kalah dalam pemilu. Partai Demokrat memenangkan pemilu tersebut dan mantan menteri masa Atatürk Celal Bayar menjadi presiden. Di bawah presiden yang baru ini, Turki semakin dekat dengan Amerika Serikat. Meski Turki tetap menganut demokrasi, tapi sejak saat itu militer mendapatkan posisi yang istimewa. Berkali-kali militer melakukan intervensi politik Turki selama masa ketidak stabilan sejak tahun 1960.

Pada tahun 1960 ini pulalah muncul partai kiri pertama Turki, partai buruh, yang dihuni oleh terutama para intelektual, penulis, dan dosen universitas. Meski demikian marxisme tetap dilarang dan sensor terhadap penyair Nazim Hikmet tetap berlangsung. Karya-karya Che Guevara dilarang, bahkan buku André Malraux, *L'Espoir* tetap mengalami sensor. Ketika sekularisme gagal menggeser ideologi dan tradisi Islam yang telah lama mengakar dalam masyarakat Turki, Revitalisme Islam muncul sebagai alternatif . Indikasinya adalah berdirinya partai-partai pro-Islam seperti Partai Orde Nasional, Partai Keselamatan Nasional, Partai Kesejahteraan (Refah) dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Ketika partai politik pro-Islam menggunakan simbol Islam secara terbuka, reaksi keras datang dari kelompok sekuleris dan di dukung militer. Kemudian, kelompok Islam mengubah strategi untuk menghapus citra “fundamentalis” dengan menggunakan tema-tema keadilan, kesejahteraan, HAM, demokrasi dan sebagainya yang pada dasarnya merupakan

substansi nilai-nilai Islam.<sup>24</sup>

Pertarungan kubu Islam dan sekuler, yang semakin marak sejak berhasilnya Partai Islam Refah pimpinan Necmettin Erbakan memegang kekuasaan pada tahun 1996. Partai Islam Refah menang dan Erbakan menjadi PM. Jargon politik Partai Refah yang menonjolkan etika, tradisi, keadilan sosial, dan menolakwesternisasi. Refah memperjuangkan Islam model khas Turki sesuai dengan aspirasi massa Islam. Refah bukan partai Islam militan atau fundamentalis, tetapi partai moderat yang menjunjung nilai demokrasi dan pluralisme. Namun, tahun 1997 Turki melalui tangan militer melarang partai itu ketika dianggap Partai Refah terlalu memperjuangkan Islam.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Turki melarang partai Islam Fadilah (Virtue Party) yang menguasai 102 dari 550 kursi parlemen, melakukan aktivitasnya, merupakan bagian dari pertarungan panjang Ataturkisme dan Islamisme sejak diproklamasikannya negara Turki modern tahun 1923 yang menganut faham sekuler oleh Mustafa Kemal Ataturk. Keputusan itu mencakup pengusiran dua pimpinan Partai Fadilah dari keanggotaan parlemen, dan tiga pimpinan lainnya dilarang melakukan aktivitas politik selama lima tahun.

Dalih keputusan tersebut adalah Partai Fadilah melakukan aktivitas kontrakonstitusi negara Turki modern yang berbasis pada ideologi Kemal Ataturk dengan sendi faham sekularisme. Hilangnya partai Islam Fadilah dari pentas politik Turki saat ini, memperpanjang catatan sejarah partai Islam di negara tersebut yang dilarang melakukan aktivitas oleh Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tahun

---

<sup>24</sup> <http://www.psktti-ui.com/abstrak.php?id=7101090883>



1962 itu. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi tersebut melarang aktivitas partai Islam Refah pimpinan mantan PM Necmettin Erbakan pada tahun 1998, dan partai Penyelamat Nasional yang juga dipimpin Erbakan pada awal tahun 1980-an.

Partai Fadilah (FP), yang dilarang aktivitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, merupakan partai politik peraih suara terbesar ketiga pada pemilu 1999, setelah Partai Kiri Demokrat (DSP) dan Partai Aksi Demokrasi (MHP). FP pimpinan Recai Kutan meraih 15,41 persen suara atau 102 dari 550 kursi parlemen. Sedang DSP pimpinan PM Bulent Ecevit meraih 21,71 persen atau 136 kursi parlemen, dan MHP pimpinan Devlet Bahceli memperoleh suara 18,03 persen atau 128 kursi parlemen.

Partai-partai Islam Turki sejak era Partai Salamah, Partai Refah, Partai Fadilah, serta Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) ternyata komitmen menghormati ideologi sekuler negara Turki modern yang dikemas Mustafa Kemal Ataturk. Bahkan, AKP pimpinan Tayyip Erdogan yang memenangkan pemilu tahun 2002 secara gemilang tidak mempertentangkan Islam dan ideologi sekuler.

<sup>25</sup>Permainan politik cantik partai-partai Islam Turki itu membawa mereka semakin diterima masyarakat negara itu dan akhirnya bisa berkuasa melalui mekanisme konstitusional dan demokratis.

Partai Politik Turki yaitu: <sup>26</sup>

1. Parti Turki Yang Cerah (Aydınlık Türkiye Partisi, ATP)
2. Parti Komunis Turki (Türkiye Komünist Partisi, TKP)

<sup>25</sup> <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=21437&lan=ba&sid=1&sp=0>

<sup>26</sup> [http://anrizal.blogspot.com/2006/01/berkenalan-dengan-sejarah-turki-la\\_15.htm](http://anrizal.blogspot.com/2006/01/berkenalan-dengan-sejarah-turki-la_15.htm)

3. Parti Demokrat (Demokrat Parti, DP)
4. Felicity Parti (Saadet Partisi, SP)
5. Parti Kebebasan Dan Perpaduan (Özgürlük ve Dayanışmak Partisi, ÖDP)
6. Parti Turki Bebas (Bağımsız Türkiye Partisi, BTP)
7. Parti Pembangunan dan Keadilan (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP)
8. Parti Buruh (Emek Partisi, EP)
9. Parti Liberal Demokratik (Demokrat Yang Parti Liberal Parti, LDP)
10. Parti Pergerakan Nasionalis (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP)
11. Parti Pendakian (Halkın Yükselişi Partisi, HYP)
12. Parti Republik (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP)
13. Parti Buruh (İşçi Partisi, İPETANG)
14. Parti Muda(Genç Parti, DOKTOR).